



TESIS

Judul:

Kekuatan Akta RUPS Yang Dibuat Tanpa
Kehadiran Seorang Direksi Yang Akan Diganti
(Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI)

Disusun oleh:

NURUL IZZAH
NIM. 217222021

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**KEKUATAN AKTA RUPS YANG DIBUAT TANPA
KEHADIRAN SEORANG DIREKSI YANG AKAN DIGANTI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35/PDT/2021/PT KDI)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister
Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh :

Nama : Nurul Izzah

NIM 217222021

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2024

Pengesahan

Nama : NURUL IZZAH
NIM : 217222021
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : Kekuatan Akta RUPS Yang Dibuat Tanpa Kehadiran
Seorang Direksi Yang Akan Diganti (Studi Kasus Putusan
Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI)
Title : The Strength Of A GMS Deed Made Without The Presence
Of A Director Who Will Be Replaced (Case Study Decision
Number 35/Pdt/2021/PT KDI)

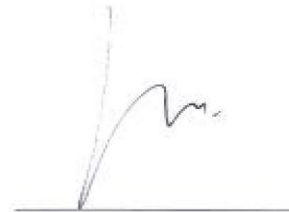
Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 09-Juli-2024.

Tim Penguji:

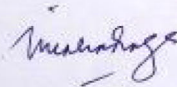
1. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.
3. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum.,
MKn.
NIK/NIP: 10215007



Jakarta, 09-Juli-2024
Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

Persetujuan

Nama : Nurul Izzah
NIM : 217222021
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Kekuatan Akta RUPS Yang Dibuat Tanpa Kehadiran Seorang Direksi
Yang Akan Diganti (Studi Kasus Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT
KDI)

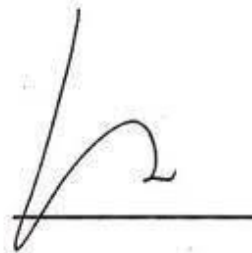
Tesis ini disetujui untuk diuji.

Jakarta, 11 Juni 2024

Dosen Pembimbing:

Dr. Benny Djaja, S.E., S.H., M.M., M.Hum., M.Kn.

NIDN: 0322086307

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'B' followed by a horizontal line and a small flourish.

ABSTRAK

- (A) Nama : Nurul Izzah; NIM. 217222021
(B) Judul Tesis : Kekuatan Akta RUPS Yang Dibuat Tanpa Kehadiran Seorang Direksi Yang Akan Diganti (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI)
(C) Halaman : x + 156 + Daftar Pustaka + Lampiran; 2024
(D) Kata Kunci : Pemberhentian Direksi, Pemanggilan, RUPS
(E) Isi :

Direksi pada sebuah perseroan memiliki peranan yang penting dalam melakukan pengurusan berbagai kegiatan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, hal tersebut dikarenakan Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang cukup besar untuk mengelola perusahaan sesuai dengan batas-batas wewenangnya dan kewenangan tersebut dibatasi oleh aturan-aturan hukum serta peraturan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Perseroan. Di sisi lain, Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS tanpa pemberitahuan dan ketidakhadiran Direksi yang bersangkutan. Kekuatan akta rapat umum pemegang saham terhadap pemberhentian direksi tanpa pemberitahuan dan ketidakhadiran ini yang menjadi penelitian dalam tesis, Metode penelitian hukum dengan jenis/tipe penelitian Normatif, menggunakan pendekatan penelitian *statute approach* dan *conceptual approach*. Adapun sumber data sekunder yakni menggunakan bahan hukum primer berupa regulasi yang relevan dengan isu hukum dan bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat maupun teori hukum yang relevan dengan isu hukum dalam penulisan ini, sehingga dengan analisis tersebut maka disimpulkan kekuatan akta rapat umum pemegang saham terhadap pemberhentian Direksi tanpa pemberitahuan dan ketidakhadiran dalam agenda rapat RUPS yakni pemanggilan RUPS tetap wajib ada sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, meskipun dalam RUPS telah hadir pemegang saham agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Terkait Risalah Rapat dibawah tangan hasil dari pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) terhadap penggantian Direksi tanpa pemberitahuan dan ketidakhadiran yaitu tidak sah. Mengenai pemberhentian Direksi harus didahului dengan undangan dan pemanggilan kesempatan untuk membela diri seperti yang tercantum pada pasal 105 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UUPT, sehingga Notaris berhak menolak untuk membuat akta tersebut apabila bertentangan pada UUPT.

Kata Kunci : Pemberhentian Direksi, Pemanggilan, RUPS.

ABSTRACT

- (A) Name : Nurul Izzah; NIM. 217222021
- (B) Thesis Title : *The Strength Of A GMS Deed Made Without The Presence Of A Director Who Will Be Replaced (Case Study Decision Number 35/PDT/2021/PT KDI).*
- (C) Page : x + 156 + Daftar Pustaka + Lampiran : 2024
- (D) Keywords : *Pemberhentian Direksi, Pemanggilan, RUPS*
- (E) Content :

The Board of Directors in a company has an important role in managing various activities for the benefit of the company's aims and objectives, this is because the Board of Directors is a company organ that has sufficient authority to manage the company in accordance with the limits of its authority and this authority is limited by the rules. applicable legal rules and regulations including the Company's Articles of Association. On the other hand, Directors can be dismissed at any time by the GMS without notification and in the absence of the Director concerned. The power of the deed of the general meeting of shareholders against the dismissal of directors without notice and absence is the research in the thesis, Legal research method with Normative research types, using the research approach statute approach and conceptual approach. The secondary data sources use primary legal materials in the form of regulations that are relevant to legal issues and secondary legal materials which are opinions and legal theories that are relevant to the legal issues in this writing, so that with this analysis it can be concluded that the strength of the deed of the general meeting of shareholders on the dismissal of the Directors without notification and absence from the GMS meeting agenda, namely the summons to the GMS is still mandatory in accordance with the provisions contained in the Limited Liability Company Law, even though shareholders are present at the GMS so as not to cause disputes in the future. Regarding

the Minutes of the Meeting under hand, the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) which were then included in the Deed of Meeting Decision Statement (PKR) regarding the replacement of Directors without notification and absence, which is invalid. Regarding the dismissal of the Board of Directors, it must be preceded by an invitation and summons for an opportunity to defend oneself as stated in article 105 paragraph (2), paragraph (3), and paragraph (5) of the UUPT, so that the Notary has the right to refuse to make the deed if it conflicts with the UUPT.

Keywords: Dismissal of Directors, Summons, GMS.

KATA PENGANTAR

Rasa puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat-Nya dan anugerah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “**KEKUATAN AKTA RUPS YANG DIBUAT TANPA KEHADIRAN SEORANG DIREKSI YANG AKAN DIGANTI (STUDI**

KASUS PUTUSAN NOMOR 35/PDT/2021/PT KDI)” ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Selama penyusunan tesis ini diperlukan kesabaran dan usaha yang keras dengan harapan dapat memberikan sesuatu yang terbaik, dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Studi di bidang Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dengan tersusunnya tesis ini, maka Penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis hingga tesis ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Benny Djaja, S.E., S.H., M.M., M.Hum., M.Kn., selaku dosen pembimbing tesis yang senantiasa telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan dukungan untuk membantu dan membimbing dari awal sampai akhir penyusunan tesis ini. Penulis pun sangat berterima kasih atas motivasi, kepercayaan, kesabaran, dan ilmu-ilmu yang telah diberikan semasa perkuliahan ataupun dalam penyusunan tesis ini serta memberikan saran dan penyempurnaan dalam penulisan.
4. Orang Tua Penulis, Misbah dan Endang Setyarini yang selalu mendoakan, mendukung secara material dan immaterial, dan memotivasi Penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Adik Penulis, Khokhiri yang telah memberikan bantuan serta menemani Penulis dalam pengumpulan data dan penulisan tesis ini sampai selesai.

6. Ibu Dr. Marta Sri Wahjuni, S.H., Sp.N., M.H., selaku narasumber praktisi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai hal sangat spesifik serta memberikan pendapat dan ilmu yang berkaitan dengan pembahasan dalam tesis ini kepada Penulis. Serta berhak menerima wawancara kepada Penulis dalam rangka mengumpulkan data berkaitan dengan tesis ini.
7. Bapak Agus Riyanto, S.H., LL.M., selaku narasumber akademisi Dosen Binus University Bidang Hukum Investasi & Hukum Perusahaan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pendapat dan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang berkaitan dengan isi materi tesis ini kepada Penulis. Serta berhak menerima kunjungan observasi dan wawancara kepada Penulis dalam rangka mengumpulkan data berkaitan dengan tesis ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff di Universitas Tarumanagara atas ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.
9. Teman seperjuangan, Jessica Calista dan Werner Wada Betu yang telah memberikan bantuan-bantuan informasi-informasi, teknis, dan telah menyemangati Penulis dalam menyelesaikan tesis ini; dan
10. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis.

Penulis menyadari tanpa peran-peran mereka, tesis ini tidak akan selesai dengan sempurna, bahkan tidak akan selesai sama sekali. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah Penulis sebutkan di atas.

Akhir kata, Penulis telah berusaha agar penulisan tesis ini selesai dengan sesempurna mungkin. Namun, Penulis sangat menghargai berbagai pendapat-pendapat dan masukan-masukan terhadap pengembangan penulisan tesis ini, sehingga tesis ini dapat menjadi bahan bacaan yang lebih dapat diterima dan berguna untuk berbagai pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 10 Juni 2024

Penulis

Nurul Izzah

Pernyataan

Nama : Nurul Izzah
NIM : 217222021
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Kekuatan Akta RUPS Yang Dibuat Tanpa Kehadiran
Seorang Direksi Yang Akan Diganti (Studi Kasus Putusan
Nomor 35/PDT/2021/PT KDI)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Juni 2024

Yang menyatakan



Nurul Izzah

NIM. 217222021

DAFTAR ISI

Cover Luar	i
Cover Dalam	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Persetujuan	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
Lembar Pernyataan/Orisinalitas	xi
Daftar Isi	xii
Daftar Singkatan.....	xv
Daftar Bagan	xvi
Daftar Lampiran.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual dan Teoretis.....	9
1. Kerangka Konseptual	9
2. Kerangka Teoretis	19
E. Metode Penelitian	24

1. Jenis Penelitian.....	24
2. Spesifikasi Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Data.....	25
4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
5. Metode Analisis	26
F. Sistematika Penulisan	26
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 28
A. Teori Keadilan.....	28
B. Teori Badan Hukum	37
C. Teori Tanggung Jawab.....	46
D. Teori Kepastian Hukum	52
 BAB III DATA HASIL PENELITIAN	 61
A. Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 35/PDT/2021/PT KDI.....	61
1. Para Pihak... ..	61
2. Kasus Posisi	63
3. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Kka	66
4. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI.....	73
B. Fakta Hukum.....	75
1. Bukti-Bukti	75
2. Keterangan Saksi-Saksi.....	77
C. Data Hasil Wawancara.....	82
1. Hasil tanya jawab dengan Ibu Marta Sri Wahjuni, S.H., Sp.N.,M.H....	82
2. Hasil tanya jawab dengan Bapak Agus Riyanto, S.H., LLM	87
 BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	 99
A. Konsekuensi hukum dalam RUPS yang tidak mengundang seorang	

Direksi yang akan diganti berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI	
.	99
B. Kekuatan akta terhadap penggantian Direksi melalui RUPS tanpa	
kehadiran Direksi tersebut	121
BAB V PENUTUP	144
A. Kesimpulan	144
B. Saran	148
Daftar Pustaka	149
LAMPIRAN	157

DAFTAR SINGKATAN

AD	adalah	Anggaran Dasar
ART	adalah	Anggaran Rumah Tangga
UU	adalah	Undang-Undang Dasar
UUJN	adalah	Undang-Undang Jabatan Notaris
UUPT	adalah	Undang-Undang Perseroan Terbatas
KUHP	adalah	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	adalah	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MKn	adalah	Magister Kenotariatan
PPAT	adalah	Pejabat Pembuat Akta Tanah
PT	adalah	Perseroan Terbatas
PKR	adalah	Pernyataan Keputusan Rapat
RUPS	adalah	Rapat Umum Pemegang Saham
RUPS LB	adalah	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Konseptual	9

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
2. Lampiran 2 : Pembimbing Proposal dan Tesis Program Studi Magister
Kenotariatan Semester Genap Tahun 2023-2024
3. Lampiran 3 : Rekap Berita Acara Bimbingan
4. Lampiran 4 : Surat Keterangan Hasil Turnitin Tesis
5. Lampiran 5 : Surat Keterangan Hasil Turnitin Artikel
6. Lampiran 6 : Permohonan Survei atas Riset Wawancara Notaris &
PPAT Ibu Marta Sri Wahjuni S.H., Sp.N., M.H
7. Lampiran 7 : Permohonan Survei atas Riset Wawancara Dosen Binus
University Bidang Hukum Investasi & Hukum
Perusahaan Bapak Agus Riyanto, S.H., LL.M.
8. Lampiran 8 : *Letter of Acceptance* & Published Artikel
9. Lampiran 9 : Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT KDI